

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terjadi perubahan pada sistem pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengolah serta mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpindahan kebijakan dari sentralisasi ke desentralisasi dikenal dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik serta transparansi terhadap pengelolaan keuangan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Kriteria tata kelola yang baik terdiri dari keadilan, akuntabilitas, transparansi serta tanggungjawab pemerintah dalam melaporkan laporan keuangannya. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi terhadap pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan melalui sebuah laporan atau media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk menyalurkan informasinya berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian serta evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik dan dasar untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas agar pemakai laporan keuangan dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, maka prinsip-prinsip akuntansi harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini berarti laporan keuangan suatu pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan cara mempertimbangkan terhadap kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2010-2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan terus meningkat hingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 7 kali berturut-turut mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik karena dapat

meningkatkan laporan keuangannya dengan berhasil meraih WTP 7 kali berturut-turut. Hasil pemeriksaan LKPD tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010-2020

Pencapaian opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut dapat menjadi inspirasi dan tekad bagi seluruh ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel, transparan dan berdaya saing. Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan tersebut bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK mengungkapkan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut antara lain, pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal, kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan denda keterlambatan belum dikenakan serta penatausahaan aset tetap belum tertib. Meski demikian, Agus Joko Pramono selaku wakil ketua BPK menyebutkan dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah sudah baik namun masih harus ditingkatkan, agar kualitas akan informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat dan lebih akurat terutama pada bagian pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan salah satunya komitmen organisasi. Menurut Indah (2022) komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan atau keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi yang dilihat sejauh mana seseorang tersebut mampu terlibat aktif dan memberikan kontribusi bagi organisasinya. Dengan komitmen yang dimiliki oleh masing-masing individu pada organisasi bisa memberi pengaruh kinerja pada proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Hasil penelitian Manimpurung et al., (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah bagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Adanya pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dapat menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Launtu (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor lain yang menunjang keandalan laporan keuangan yaitu peran auditor internal. Auditor internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang harus bisa memberikan jaminan atas seluruh proses akuntansi beserta pelaporannya yang telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah demi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Sasmita et al., (2020) peran auditor internal yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran auditor internal selaku pengawas internal pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Hasil penelitian Syawalina dan Rosmeiwati (2019) menyatakan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Peran Auditor Internal berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas dalam pembahasan. Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai pengaruh komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan..

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, peran auditor internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu penelitian ini juga

diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, peran auditor internal, dan kualitas laporan keuangan.